

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SASTRA DITINJAU DARI FAKTOR EKSTERNAL

1. Pendahuluan

Pembelajaran, menurut Mackey (1984:39-40) terdiri atas lima elemen utama yaitu (1) terdiri atas metode dan materi, (2) guru, (3) instruksional/ program pembelajaran. (4) pengaruh lingkungan sosiolinguistik dan sosiokultural, dan (5) pembelajaran. Kelima elemen tersebut adalah faktor internal pembelajaran bahasa dan sastra, sedang faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kebijakan pendidikan dan kebijakan bahasa, dan masyarakat.

Strevens dalam Stern (1984:41-42) memaparkan model kerangka konseptual pembelajaran bahasa dan sastra menjadi dua belas elemen. Lima elemen utama yang meliputi penerapan kebijakan dan tujuan, administrasi dan organisasi, disiplin profesional, pemilihan tipe, pembelajaran dan pelatihan guru disebut faktor eksternal. Sedangkan elemen lainnya seperti pendekatan, metodologi, perancangan Silabus, penyusunan materi, kendala pembelajaran, pembelajaran evaluasi, dan tujuan sebagai faktor internal.

Pembelajaran merupakan suatu proses. Setiap pembelajaran melibatkan beberapa proses internal, antara satu dengan lainnya mungkin dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal (Gagne dan Briggs, 1979:10).

Dalam makalah ini dipaparkan fungsi, tujuan pengajaran sastra, dan ketetapan kurikulum. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi problematika pembelajaran sastra dari faktor eksternal, sebagaimana tersebut dalam judul makalah.

2. Fungsi dan Tujuan Pengajaran Sastra

2.1. Fungsi

Fungsi bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dan produk budaya yang berkonsekuensi pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai (1) Sarana pembinaan, kesatuan dan persatuan bangsa serta pemahaman beberapa budaya Indonesia melalui khasanah Sastra Indonesia, (2) Sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) Sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) Sarana penyebaran pemakaian Bahasa dan Sastra Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan yang menyangkut berbagai masalah, (5) Sarana pengembangan dan penalaran, dan (6) Sarana menimbulkan kecintaan dan penghargaan terhadap bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan (Puskur, 2003:9). Dengan demikian pembelajaran sastra diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi. Fungsi-fungsi di atas senada dengan pernyataan (Rahmanto, 1991:25) bahwa pembelajaran adalah pembelajaran apresiasi. Begitu juga dalam kurikulum 2004 sebagai berikut.

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi pada hakikat pembelajaran bahasa, yaitu belajar berbahasa dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya (Depdiknas, 2003:3).

Dengan demikian pembelajaran Sastra diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi.

2.2. Tujuan Pengajaran Sastra

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah (1) siswa menghargai dan membanggakan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan sebagai bahasa negara, (2) Siswa memahami Bahasa dan sastra Indonesia dan segi bentuk, makna, dan fungsi, serta dapat menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan, (3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan kematangan sosial, (4) Siswa memiliki disiplin dan ketertiban dalam berfikir dan berbahasa, (5) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan (6) Mampu menyalurkan potensi intelektual, gagasan, dan imajinasi secara kreatif dan konstruktif (Depdiknas, 2001:9)

Tujuan pokok pengajaran (pembelajaran sastra) adalah membina apresiasi anak yaitu membina anak didik agar memiliki kesanggupan untuk memahami, menikmati, dan menghargai suatu cipta sastra.

Dalam Simposium bahasa dan kesusastraan Indonesia 1966 disimpulkan bahwa pengajaran kesusastraan agar memperoleh efek sebesar-besarnya hendaknya diarahkan pada pembicaraan apresiasi. Menurut (Effendi, 1973: 18) apresiasi adalah kegiatan menggali cipta sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra.

Sehubungan dengan pengajaran sastra, masalahnya bukan apa apresiasi sastra itu dapat dibina atau dilaksanakan? Tetapi seharusnya bagaimanakah hubungan apresiasi sastra dengan pendidikan, sebab pengajaran sastra tidak lepas dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu pengajaran sastra harus diarahkan pada tujuan pendidikan.

Berdasarkan hirarkinya tujuan pendidikan meliputi (1) Tujuan umum, (2) tujuan pendidikan nasional, (3) tujuan instusional, dan (4) tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan nasional memberikan corak tujuan umum yang hendak kita capai sesuai dengan pandangan hidup kita yang tercantum dalam tap MPR, Undang-undang pendidikan. Adapun yang disebut tujuan umum pendidikan adalah tujuan yang universal yang bersifat kekal. Tentang tujuan umum ini Sastrowardoyo (1961) mengatakan

"Di dalam pendidikan" kita harus menumbuhkan pribadi-pribadi yang dapat menghadapi situasi zaman dan tuntutan masyarakat secara positif. Pendidikan pada dasarnya harus mengembangkan pribadi-pribadi ini. Jadi tujuan umum pendidikan adalah membentuk dan mengembangkan pribadi manusia seutuhnya yaitu hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pembinaan apresiasi sastra dalam pengajaran sastra berusaha menumbuhkan rasa peka dan rasa cinta anak terhadap sastra, sebagai cipta seni. Dengan usaha ini diharapkan, pengajaran sastra dapat menumbuhkan keseimbangan antara berbagai aspek kejiwaan anak, sehingga terbentuk pribadi yang utuh.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pembinaan apresiasi sastra sebagai tujuan kurikulum mengarah pada aspek-aspek kejiwaan anak menuju kepada pribadi anak. Oleh karena itu, pengertian apresiasi paling tidak tercakup tiga kegiatan psikologis yaitu pemahaman, penikmatan, dan penilaian. Dan pemahaman anak dituntut kemampuan berfikir secara kritis dan logis, dari penikmatan-penikmatan mampu mengembangkan berbagai emosi anak. Sedangkan penilaian menumbuhkan daya imajinasi dan sifat kreatif anak. Dalam realitanya ketiga kegiatan itu sangat kompleks, semua itu besar peranannya bagi pembentukan pribadi anak. Dengan demikian usaha menanamkan rasa cinta anak kepada sastra merupakan langkah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sastra corak ragamnya sangat banyak ada corak yang berdasarkan kandungan ide religi, filsafat, politik. Dengan bermacam-macam corak, timbul pertanyaan sehubungan tujuan pendidikan, yakni corak yang mana yang perlu disajikan pada pembelajar? Dengan demikian kita harus selektif dalam menentukan bahan seleksi yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan segi idiologis, psikologis pedagogis, dan estetis. Agar secara potensial mampu mengembangkan pribadi manusia sesuai dengan tujuan pendidikan di negara kita.

Tujuan intitusional bersangkut paut dengan jenis dan tingkat sekolah, apakah sekolah umum atau kejuruan, untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah tingkat atas (SMA). Tujuan instutional mambatasi seberapa luas dan dalamnya pengajaran sastra itu harus disajikan kepada anak. Sesudah arah dan bahan ditentukan, maka penjenjangan pemberian bahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sastra di sekolah adalah pembina an apresiasi sastra dalam rangka pembentukan kebulatan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Ketentuan Kurikulum

Kurikulum berbasis kompetensi (Kurikulum 2004) berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup (Life skill education) pembelajaran kecakapan hidup memerlukan reorientasi pendidikan dan subject matter direnteel menjadi life skill oriented. Pendidikan kecakapan hidup merupakan orientasi kompetensi pembelajaran yang ditetapkan yang harus dimiliki pembelajaran diharapkan bermanfaat bagi kehidupannya pada masa kini dan masa mendatang. Kompetensi tiap mata pelajaran diharapkan memberikan penajaman terhadap kompetensi kehidupan yang meliputi kompetensi kompetensi pengenalan diri (personal skill), berpikir rasional (rational thingking skill), sosial (social skill), akademik (akademik skill), dan vocational skill atau kejuruan (Depdiknas, 2003 : 7) Kecakapan-kecakapan hidup di atas dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, kecakapan mengenal diri atau kecakapan personal mencakup (1) penghayatan diri sebagai mahluk 'fuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, dan (2) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekaligus menjadikanya modal dalam meningkatkan diri sendiri dan lingkungannya. Kedua Kecakapan berfikir rasional mencakup (1) Kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching), (2) Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision making skills), dan (3) Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (Creative problem solving skill). Ketiga kecakapan sosial atau kecakapan antar personal (inter-personal skill) meliputi (1) kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill) dan (2) Kecakapan bekerjasama (collaboration skill). Empati sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan yang baik akan menumbuhkan hubungan harmonis. Keempat, kecakapan akademi (academic skill) yang sering juga disebut kemampuan berfikir ilmiah mencakup antara lain (1) Identifikasi variable dan menjelaskan hubungan antara variable tersebut (Identyfmg variable and describing variable relationship among them) (2) merumuskan hipotesis (construeting hypoteses), serta (3) merancang dan melaksanakan penelitian (designing and implementing a research). Kelima kecakapan vokasional (Vocational skill), sering kali disebut juga dengan kecakapan kejuruan artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam kehidupan nyata, antara general life skill (GLS) dan specific life skill (SLS) yaitu antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berfikir rasional, kecakapan sosial dan kecakapan akademik serta kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-

kecakapan tersebut sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Derajat kualitas individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas.

Dalam memilih pengalaman belajar perlu dipertimbangkan kecakapan hidup apa yang akan dikembangkan pada setiap kompetensi dasar dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA hampir semua kecakapan hidup (Life Skill) dapat diterapkan dan dikembangkan, sehingga aspek pembelajaran sastra dirinci menjadi (1) Mendengarkan Sastra (mendengarkan dan memahami serta menganggap berbagai ragam karya sastra berupa puisi, cerpen, novel, dan drama). (2) Berbicara Sastra (Mengucapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan dalam berbagai bentuk wacana lisan serta berupa puisi, cerpen, novel, dan drama) , (3) Membaca Sastra (Membaca dan memahami berbagai teks bacaan sastra melalui membaca dan menganalisis berbagai karya sastra berupa puisi, cerpen, hikayat, novel Indonesia dan terjemahan , drama dan esai, (4) Menulis sastra (mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai bentuk tulisan sastra berupa puisi, cerpen, novel, drama, resensi, dan esai.

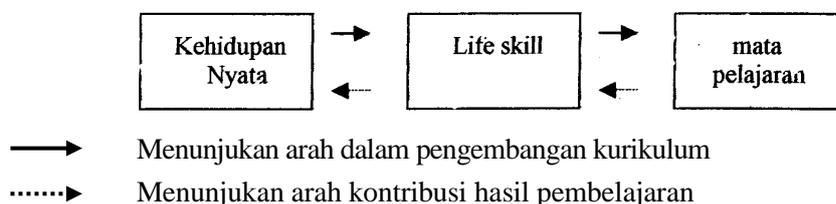
Sehubungan dengan pemahaman kecakapan hidup melalui pembelajaran sastra, dalam kurikulum 2004 , maka pembelajaran Bahasa dan Sastra diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Standar kompetensi ini dimaksudkan agar siswa siap mengakses situasi perkembangan multiglobal dan lokal yang berorientasi pada keterbukaan dan kemasadepan (Depdiknas, 2003:3)

Dalam kaitannya antara pembelajaran sastra dengan tujuan belajar agar mampu mengakses situasi dan perkembangan multiglobal, pembelajaran Sastra paling tidak bisa memberikan dua sumbangan yaitu (1) Membentuk skemata tentang dunia global dan kehidupan masa depan, dan (2) mempertajam salah satu strategi belajar yang terkait dengan kecakapan sosial, menggali dan mengolah informasi.

4. Hubungan Antara Kehidupan Nyata, Kecakapan Hidup, dan Mata Pelajaran

Mungkin akan muncul pertanyaan, lantas bagaimana hubungan antara kehidupan nyata dengan pelajaran ? Di sekolah diajarkan berupa mata pelajaran / mata diklat, dan ujiannya berupa keduanya. Bukankah yang seharusnya diajarkan dan diujikan adalah tentang tema-tema kehidupan nyata ?

Di bawah ini menunjukkan skema hubungan antara kenyataan hidup, kecakapan hidup, dan mata pelajaran.



Pada tahap awal, dilakukan identifikasi kecakapan hidup yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Kecakapan hidup yang sudah teridentifikasi kemudian dipertegas dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung pembentukan kecakapan hidup tersebut. Tahap selanjutnya kecakapan hidup tersebut di klasifikasikan dalam bentuk tema-tema yang dikemas dalam bentuk mata pelajaran. Pemberian bekal bagi pembelajaran ditunjukkan anak panah bergaris tegas. Yaitu apa yang dipelajari pada setiap pelajaran diharapkan dapat membentuk kecakapan hidup yang nantinya diperlukan pada saat yang bersangkutan memasuki dunia nyata di masyarakat.

Dari pemahaman tersebut, mata pelajaran adalah alat, sedangkan yang ingin dicapai adalah pembentukan kecakapan hidup. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan pada saat seseorang memasuki kehidupan sebagai individu yang mandiri, anggota masyarakat, dan warga negara. Kompetensi yang dicapai pada mata pelajaran hanyalah kompetensi antara untuk mewujudkan kemampuan nyata yang diinginkan yaitu kecakapan hidup, misalnya mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia bukan sekedar paham bahasanya, tetapi mampu menggunakan untuk bernalar mengungkap dan menyampaikan buah pikiran dalam komunikasi yang efektif.

Inovasi pendidikan mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup. Model pembelajaran terpadu (*Intregrated Learning*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) merupakan model pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kecakapan hidup. Model pendidikan realistik (*realistic education*) merupakan upaya mengatur agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata pembelajar agar hasilnya dapat diterapkan guna memecahkan dalam mengatasi problem hidup yang dihadapi (Depdiknum).

5. Problematika

Komponen-komponen dan rambu-rambu pembelajaran sastra jelas tercantumkan dalam kurikulum, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan problema. Beberapa problema dari factor eksternal dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

5.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan khususnya, dalam bidang pembelajaran sastra, dapat dikatakan masih menimbulkan beberapa masalah. Berbagai upaya telah dilakukan, baik penyempurnaan pendidikan maupun penyempurnaan kurikulum. Upaya tersebut tidak berpihak pada hasil evaluasi dilapangan tetapi begitu saja menerima tawaran proyek yang kadang-kadang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi maupun tuntutan masyarakatnya, sehingga langkah-langkah yang ditempuh belum menunjukkan hasil yang diharapkan atau belum memuaskan. Seperti simpulan dalam konggres Bahasa dan Kesusastraan Indonesia tahun 1966, bahwa pengajaran sastra di sekolah belum memuaskan. Hal ini merupakan salah satu bagian dari problematika kemerosotan mutu pendidikan di negara kita. Alternatif solusi problema tersebut pemerintah dalam hal pengelolaan pendidikan sebaiknya menyerahkannya pada seseorang dengan keahlian yang dimiliki agar tidak salah arah.

Hal lain yang harus diakui bahwa manajemen pendidikan belum sempurna baik mengenai pembiayaan, pengelolaan, dan system manajemennya. Secara mikro manajemen pendidikan kita masih sentratistik dan birokratik, sehingga ruang gerak untuk melakukan inovasi sangat terbatas juga unsure kreatifitas guru hilang,

Adanya dualisme dalam penyelenggaraan pendidikan serta tidak adanya koordinasi yang mantap menyebabkan manajemen pendidikan menjadi semrawut. Antara berbagai lembaga birokrasi yang mengelola pendidikan (Depdikbud, Depdagri, Depag, Depku) sering tidak menjalin kesepakatan yang dapat menjamin kualitas outcome pendidikan nasional. Masing-masing lembaga melakukan Otoritasnya sendiri sehingga tidak ada efisiensi bagi penggunaan dana yang sudah amat terbatas. Belum lagi dengan adanya oknum-oknum yang melakukan manipulasi dan korupsi.

Selain itu tampak pula antara penyelenggara pendidikan pemanfaatannya outcomenya tidak punya kaitan riil. Antara supply dan demand terdapat jurang yang dalam sehingga tidak mengherankan antara jumlah prosentasi lulusan dan kesempatan kerja sangat tidak berimbang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perlu adanya pembenahan dalam manajemennya, dengan desentralisasi pendidikan, mengembangkan pendidikan satu atap.

Masalah pembiayaan merupakan masalah klasik dalam pendidikan di negara kita. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah ini selain memobilisasi dana pemerintah (APBN dan APBD) untuk prioritas pendidikan 35% dan APBD, penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk gaji guru, serta untuk pelatihan dan penelitian guna meningkatkan profesionalisme para guru.

Dana untuk pendidikan dan pelatihan seharusnya dibebaskan dan berbagai jenis pajak. Juga untuk upaya pengadaan buku untuk para guru dan siswa agar liarga buku yang mahal ditekan seminimal mungkin. Agar bisa membantu guru dan siswa mendapat buku-buku yang berkualitas untuk meningkatkan pengetahuannya, perlu segera d. . tis usaha-usaha meringankan sekecil mungkin pajak-pajak penerbitan. Dengan kata lain sector pendidikan dijadikan struktur utama dengan prioritas pendidikan utama pula.

Pemberdayaan Tenaga Guru

Guru merupakan ujung tombak dari sebuah system pendidikan nasional. Melalui tangan gurulah kira-kira 75% berhasil tidaknya pendidikan ditentukan. Saat ini, apa pun alasannya dalam realitanya profesi guru mengalami kemerosotan. Di lain pihak masyarakat tetap membutuhkan keberadaan guru sebagai salah satu ujung tombaknya.

Ironisnya posisi guru di negara kita saat ini dipandang sebagai profesi yang kerdil. Profesi guru kurang diminati, bahkan tidak lagi diminati oleh generasi muda. Di dalam UMNTN minat calon mahasiswa untuk menjadi guru adalah pilikan kesekian dibandingkan profesi lainnya.

Kerdilnya profesi guru disebabkan profesi ini tidak menjanjikan secara ekonomis. Tingkat kesejahteraan guru masih rendah (bahkan menyedihkan) karena gaji yang teramat kecil. Perin dicatat bahwa di negara kita ini, gaji guru paling kecil di banding negara-negara lainnya. Kerdilnya profesi guru ini menyebabkan kemerosotan Penghargaan masyarakat terhadap guru. Padahal suatu profesi bisa berkembang jika profesi tersebut dihargai oleh masyarakat berpengaruh pula terhadap penghargaan murid terhadap guru.

Dalam hal ini pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap kerdilnya profesi guru. Untuk mengangkat citra, harkat, dan martabat guru yang paling utama harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memberi gaji yang lebih pantas atau lebih tinggi.

Penghargaan dan gaji guru paling tidak harus sama dengan penghargaan gaji dokter atau profesi lainnya yang menjanjikan ekonomi yang lebih mapan. Semua ini akan mendorong kinerja guru, mengembangkan diri mereka seluas-luasnya. Mereka bisa mempunyai perpustakaan pribadi, bisa melakukan inovasi-inovasi etos kerja yang lebih tinggi dan mengembangkan ilmu seluas-luasnya, agar dapat menelorkan manusia, (lulusan) yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat luas.

5.2. Sarana dan prasarana sekolah

5.2.1. Perpustakaan sekolah

Siapa pun tahu bahwa perpustakaan sering dikatakan sebagai pilar intelektual sebuah lembaga pendidikan. Baik atau tidaknya mutu lembaga pendidikan tersebut salah satunya dilihat dari keberadaan perpustakaan tersebut, baik atau tidaknya pengelolaan perpustakaan tersebut dan bagaimama geliat penghuninya. Ada idiom yang menyatakan, "kalau ingin melihat suatu lembaga pendidikan (sekolah) mutunya baik atau tidak, lihatlah perpustakaanannya, bagaimana kondisi / jenis buku-bukunya, bagaimana pengelolanya dan berapa pula jumlah pengunjung setiap hari."

Perpustakaan, biarpun sedemikian penting keberadaannya, tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Sedikitnya ada tiga pilar penunjang utama bagi penyelenggara perpustakaan sekolah, yaitu : tersedianya ruang, anggaran, SDM pengelolanya. Perpustakaan sekolah memang bisa terselenggara tanpa harus ada gedung khusus. Yang penting ada pengelola yang kreatif, yang memiliki panggilan jiwa untuk bertugas di perpustakaan. Masalah anggaran pun bukan jadi kendala yang tidak terpecahkan jika pengelola tahu cara mendapatkannya dan mampu bekerjasama dengan pihak sekolah. Ketiga pilar ini pada masa sebelum otonomi daerah masih sering menjadi momok dan selalu menjadi kambing hitam jika kepala sekolah kurang peduli terhadap keadaan "sumber belajar" ini. Pada masa itu, pengelola perpustakaan seakan-akan tidak menjadi masalah yang signifikan. Padahal masalahnya bukan karena terbebas dari kendala, melainkan cenderung disebabkan oleh belum terpikirkannya untuk memiliki SDM pengelola perpustakaan sekolah yang professional dalam bidangnya.

Di sekolah-sekolah yang belum menyelenggarakan perpustakaan, selalu ada asumsi bahwa untuk menyelenggarakan perpustakaan harus terlebih dahulu menyediakan gedung / ruang khusus, anggapan ini memang tidak salah, tapi tidak ditindaklanjuti mencari jalan pemecahannya. Pada masa itu, sekolah yang telah memberanikan diri menyelenggarakan perpustakaan sekolah, baik dengan gedung dan anggaran yang ideal maupun seadanya, pada umumnya masih berpikir bahwa pengelola perpustakaan adalah siapa saja yang mau duduk diperpustakaan saat istirahat. Siapa saja, pesuruh pun tak peduli criteria apa yang seharusnya dimiliki oleh pengelola perpustakaan. Sehingga tidak mengherankan ada atau tidaknya pengelola perpustakaan tidak ada bedanya, perpustakaan ya perpustakaan, tempat kita meminjam buku.

Dengan demikian, apa ada pengelola perpustakaan yang bisa diandalkan? Yang professional? Yang bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab? Mungkin ada. Dia bertugas karena hatinya tertambat bersama kecintaannya kepada buku dan masa depan anak didik. Tetapi sering kali kreatifitasnya kurang bahkan tidak didukung oleh pihak sekolah maupun lingkungan. Butuh pengorbanan baik waktu, harga diri, bahkan materi, semata-mata hanya untuk menari kepedulian pengunjung sebanyak-banyaknya. Itupun tanpa imbalan yang memadai. Jangankan imbalan materi yang layak, penghargaan atas keberadaannya pun sering terabaikan.

Pustakawan di sekolah yang sering kita jumpai adalah pengelola yang berasal dari guru atau TU. Biasanya kepala perpustakaan dijabat oleh guru (kebanyakan guru bidang studi Bahasa Indonesia) sedangkan para pelaksana technic tTU. Pada umumnya penegasan untuk menjadi pengelola perpustakaan yang diberikan kepala sekolah dengan rincian: (1) Penugasan normative, (2) Penugasan intimidatif (dengan keterpaksaan), dan (3) penugasan fiktif.

Otonomi daerah yang berimbas pada otonomi pendidikan membawa angin baru dalam berbagai segi, termasuk keberadaan perpustakaan sekolah. Setidaknya dua pilar utama penyelenggara perpustakaan (pengadaan ruang dan anggaran) menjadi jelas posisinya. Yang dapat dijual lebih optimal kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. Hal ini didukung oleh terbitnya SK Mendiknas nomor 053 / U / 2001, tanggal 19 April 2001. Hal ini menjadi senjata yang sangat ampuh bagi sekolah untuk mengajukan anggaran penyelenggaraan perpustakaan dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dengan demikian dua pilar dapat teratasi.

Melalui pasal 35 UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional (UU penggantinya adalah UU RI Nomor 20 tahun 2003) tentang system pendidikan nasional, pada bagian penjelasan pasal 35 ayat 1, alines keempat menyebutkan salah satu standart sarana dan prasarana pendidikan adalah perpustakaan, maka keberadaan fungsi perpustakaan ssekolah pun, sebenarnya memperoleh landasan hukum yang lcuat. Menurut pasal tersebut, lembaga pendidikan hams menyediakan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengaturan standart minimal penyelenggara perpustakaan sekolah. Maka tidak pelu heran jika sampai saat ini masih banyak sekolah yang tidak mampu menyelenggarakan perpustakaan di sekolahnya. Dari catatan Supriyoko (Marsela, Volume 4 Juni 2002) diketahui dari 175. 286 sekolah (SD sampai SMU) hanya 5 % SD, 42 % SMP, dan 68 SMA yang menyelenggarakan perpustakaan sekolah, meskipun disadari bahwa perpustakaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan upaya penyelenggaraan pendidikan formal.

Penugasan yang ketiga sangat disayangkan kalau terjadi. Penugasan ini hanya sekedar menutupi guru yang kekurangan jam mengajar, angka kredit jabatan guru tidak terganggu dan kepangkatan terus meningkat. Tetapi apakah mereka bersedia hadir sebagai pengelola ? Jawabannya tak satu pun. Sungguh malang nasib pengelola perpustakaan, yang posisinya pun sering dicatat oleh " gum pencari angka kredit."

Pendidikan pustakawan memang sudah diselenggarakan selama 50 tahun di negara kita tetapi lulusnya belum tampak hadir di perpustakaan sekolah. Beberapa factor penyebabnya antara lain (1) Jenis perpustakaan di luar sekolah masih memerlukan tenaga pustakawan yang berjumlah besar dan menjanjikan gengsi yang lebih tinggi, (2) Semua orang tahu bekerja di sekolah gajinya sangat kecil, (3) Dan pihak sekolah tidak mau bersusah payah mencari pustakawan karena sudah bisa ditangani oleh guru atau TU.

Pengelola perpustakaan harus menguasai manajemen perpustakaan dan harus memiliki keterampilan teknis, memiliki kemampuan dan jiwa mendidik, mengaplikasikannya dalam bentuk bimbingan membaca. Disamping itu ia juga berfungsi sebagai mediator antara guru dan murid. Oleh karena itu tenaga pengelola perpustakaan harus memenuhi persyaratan, (1) Education skill, (2) Library skill, (3) Simple Clerical skill, (4) Technical skill, (5) production skill, dan (6) Anthuasme.

Upaya peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan harus sejalan dengan perkembangan masyarakat. Para pengelola yang notabene hanya pustakawan " karbitan" diharapkan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, ditunjang wawasan yang luas dan pengetahuan yang memadai. Dengan tiga bakat tersebut pustakawan mampu menunjukkan keberadaannya untuk mengisi setiap celah potensi bagi pengembangan system pelajaran di sekolah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya tak terkecuali dalam rangka penerapan kurikulum berbasis kompetensi (2004).

Kebutuhan akan SDM pengelola perpustakaan sekolah yang handal dapat dipenuhi antara lain dengan pembentukan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI). Dengan forum ini para pengelola memiliki wadah untuk menuangkan ide-ide pembinaan dan pemberdayaan pengelola. Mereka akan mampu bersuara untuk kepentingan bersama, melengkapi system pendidikan di Indonesia. Dengan demikian ia diharapkan mampu mengembangkan kreatifitasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih ada salah satu kendala yang dihadapi sehubungan dengan perpustakaan ini yaitu belum adanya pengaturan standart minimal penyelenggaraan perpustakaan sekolah.

5.3. Peran Sastrawan

Salah satu cara yang tepat dan menarik untuk meningkatkan minat terhadap sastra memang menghadirkan Sastrawan yang terkenal, terbaik ke sekolah, untuk berbagi pengalaman, dan memberi teladan langsung. Pertanyaan muncul berkali-kali di banyak sekolah. Mengapa sastrawan tidak pernah datang ke sekolah. Salah satu jawabannya tentu saja masalah anggaran. Umumnya anggaran sekolah sangat minim. Sehingga kesulitan untuk menghadirkan sastrawan ke sekolah-sekolah. Menghadirkan sastrawan ke sekolah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah seharusnya berperan aktif, untuk meningkatkan, menghidupkan semangat

apresiasi sastra melalui kehadiran sastrawan ke sekolah-sekolah, tapi itu hanya harapan tinggal harapan.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain, OSIS (Organisasi siswa intra sekolah) membuat program sastrawan masuk sekolah secara berkala, dengan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri, misalnya minta bantuan biaya The Foral Foundation, sebuah yayasan dari Amerika Serikat yang memiliki perhatian besar pada pengembangan kebudayaan dan pengembangan kesenian. Yayasan ini juga membantu sejumlah penerbit Indonesia untuk menerbitkan buku-buku sastra, bisa juga melakukan pendekatan individu terhadap Sastrawan.

5.4. *Besarnya kelas*

Besarnya kelas (class size). Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar. Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio guru dan siswa. Pada umumnya dipakai ratio 1 : 40 artinya satu orang guru melayani 40 siswa (Moving Class 36 siswa). Diduga makin besar jumlah siswa yang harus dilayani guru dalam 1 kelas makin rendah kualitas pengajaran (Sastra) demikian pula sebaliknya. Secara logika atau akal sehat, tak mungkin guru dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan, dalam situasi kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Dalam hal ini pihak sekolah harus memperhatikan pagu yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang agar tujuan yang diharapkan tercapai.

5.5. *Suasana belajar*

Suasana belajar yang demokratis akan memberi peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan suasana belajar yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana belajar yang demokratis, ada kebebasan siswa belajar, mengajukan pendapat, berdialog, berdiskusi, menilai teman sekelas, dan lain-lain. Perasaan cemas dan khawatir pada siswa sering tidak menumbuhkan kekreatifan belajar siswa.

Simpulan

Pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks. Setiap pembelajaran (Sastra) melibatkan 2 factor, yaitu factor internal dan factor eksternal, yang mana satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran dan Sastra Indonesia Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Pusat Kurikulum.
- Gagne, Robert M. dan Briggs, Leslie J. 1979. *Principles of Instructional Design*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Stern, H.H. 1984. *Fundamental Concepts of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.